

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI JAKARTA RAYA
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	243 Laporan	50 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	53 Laporan	Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya Triwulan II: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya Triwulan III: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya Triwulan IV:	Tim Pemeriksaan Laporan Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya - Evaluasi dan penyusunan laporan Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Jakarta Raya	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan		1 Laporan			Bulan Mei 2026	Triwulan I: - Persiapan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik - Penyusunan jadwal kegiatan dan identifikasi IAPS Triwulan II: - Koordinasi awal dengan instansi tempat IAPS - Pelaksanaan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden	Tim Tim Pemeriksaan Laporan dan IAPS perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik Triwulan IV: - Evaluasi Pelaksanaan IAPS - Penyusunan Laporan IAPS	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	12 Pemerintah Daerah				12 Pemerintah Daerah	Bulan November 2026	Triwulan I: - Persiapan pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Triwulan II: - Penyusunan Jadwal pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 12 Kab/Kota - Koordinasi awal dengan instansi penyelenggaraan pelayanan publik di 12 Kab/Kota Triwulan III: - Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 12 Kab/Kota Triwulan IV:	Tim Pencegahan Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Evaluasi dan penyusunan laporan hasil Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 12 Kab/Kota	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Bulan Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan II: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan III: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor - Evaluasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan	ASN Kantor Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA RAYA,

#

Dedy Irsan